

HEGEMONI NEGARA DALAM PENDIDIKAN

*Sunarso
Jurusan PKn dan Hukum, FISE, UNY.*

Abstract

Education and politics are inextricably linked. Politics is inseparable from education, unless the country plans to generate illiterate politicians' who could not be expected to lead the republic out of the current crises. You cannot escape politics or separate it from education. Politics is the way to manage the broad environment, and not merely a struggle for power. Therefore it is the duty of schools to help students differentiate between good politics and bad politics.

In general, the political significance of education in contemporary societies increases with the degree of change a society is undergoing. The massive changes which developing countries have already experienced and those, whether induced or not, which are in process, render all the more conspicuous the reciprocal relationship between politics and education in these areas.

Surely it is high time to stop being frightened by a word. Politics includes the making of governmental decisions, and the effort of struggle to gain or keep the power to make those decisions. Public schools are part of government. They are political entities. They are a fit subject for study by political scientists.

Kata kunci: hegemoni negara, politik pendidikan, ideologi pendidikan.

Pendahuluan

Ada empat definisi mengenai politik pendidikan. *Pertama*, politik pendidikan adalah metode mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. *Kedua*, politik pendidikan lebih berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. *Ketiga*, politik pendidikan berbicara mengenai metode untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sebagainya. *Keempat*, politik pendidikan berbicara mengenai sejauh mana pencapaian pendidikan sebagai pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, pembentuk bangsa yang berkarakter (Supriyoko dalam Ali Mahmudi Amnur, 2007: 5).

Politik pendidikan dimaknai sebagai sebuah endapan politik negara, penjabaran dari tradisi bangsa dan nilai-nilai, serta sistem konsepsi rakyat mengenai bentuk negara dalam sistem pendidikan (Kartini Kartono, 1977: 28).

Antara tatanan politik suatu bangsa dan sistem pendidikan terjadi *mutually reinforcing*. Politik pendidikan bertujuan untuk memperjelas arah kemajuan pendidikan demi pembangunan bangsa yang lebih baik ke depan (George F. Kneller, 1977: 128).

Politik pendidikan menjadi panduan utama perjalanan pendidikan kebangsaan. Dengan adanya politik pendidikan yang jelas, maka konsep pendidikan yang akan dibentuk dan dicapai akan berada dalam bangunan konsep yang tepat, kuat, dan kokoh. Semua itu akan melahirkan sebuah tatanan pendidikan yang mencerahkan. Dapat menghasilkan produk-produk pendidikan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual, maupun sosial. Bagi pemerintah, selaku pemegang kebijakan pendidikan, politik pendidikan akan membuat kebijakan pendidikan lebih beradab dan mencerahkan.

Hubungan Politik dan Pendidikan

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses pendidikan di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan (M. Sirozi, 2001: 3).

Di Barat, kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic*. Menurut Plato, "Para filsuf memiliki otoritas tertinggi, para warga berpendidikan menengah bertindak sebagai kekuatan militer dan polisi, dan mereka yang memasok kebutuhan ekonomi negara menempati status terendah di antara semuanya. Pendidikan harus disesuaikan secara cermat dengan reproduksi sistem. Kelas yang lebih rendah dididik untuk patuh dan diyakinkan dengan mitos-mitos politik bahwa

status mereka itu terbentuk oleh sebab-sebab alamiah (M Sirozi, 2001: 1). Walaupun utamanya membahas berbagai persoalan kenegaraan, buku tersebut juga membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Berikut ini adalah kesan mendalam Allan Bloom (Allan Bloom 1987: 380). Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Ia menjelaskan bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di tangan kelompok-kelompok elite yang secara terus menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya seakan-akan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Walaupun sangat umum dan singkat, analisis Plato tersebut telah meletakkan fondasi bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan ilmuwan generasi berikutnya.

Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe (Allan Bloom 1987: 380) mengatakan “*education and politics are inextricably linked*” (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dilepaskan). Hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok, masalah pengangguran, dan peranan politik kaum cendekia. Kesempatan dan prestasi pendidikan pada suatu kelompok masyarakat, menurut mereka, dapat mempengaruhi akses kelompok tersebut dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan signifikan antar berbagai kelompok masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendidikan dapat dilihat pada distribusi kekuasaan politik, ekonomi dan kesempatan kerja, khususnya pada sektor pelayanan publik. Di negara-negara pascakolonial, kelompok masyarakat yang mendapat *privelese* pendidikan lebih mampu melakukan konsolidasi kekuatan, lalu muncul menjadi kelompok penguasa yang menguasai partai-partai politik dan sektor pelayanan publik. *Privelese* atau diskriminasi pendidikan bisa terjadi karena alasan-alasan budaya atau agama (M Sirozi, 2001: 4).

Besarnya peran sistem persekolahan dalam meruntuhkan kolonialisme terlihat jelas dalam pengalaman bangsa Indonesia. Pada satu sisi, kebijakan politik pemerintah kolonial, politik etis, misalnya, telah memperluas akses pendidikan bagi kaum pribumi, khususnya para aktivis nasionalis. Pada sisi lain, bekal pendidikan yang diperoleh telah

memperluas wawasan sosial politik mereka dan pada saat yang sama memperkuat sentimen kebangsaan mereka. Wawasan dan sentimen kebangsaan itulah yang kemudian memacu aktivitas politik mereka dan menumbuhkan semangat perlawanan mereka terhadap pemerintah kolonial pada waktu itu.

Pemerintah kolonial pada waktu itu tentu saja berharap bahwa bekal pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan loyalitas tokoh-tokoh pribumi. Namun, kenyataan berkata lain, tokoh-tokoh tersebut justru berkembang menjadi figur utama dalam gerakan nasionalis yang menggugat kolonialisme. Inilah yang terjadi pada sosok Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya. Terlepas dari berbagai implikasi sosial politik yang menyertainya, pengalaman pendidikan dan kiprah politik tokoh-tokoh nasionalis tersebut mempertegas eratnya hubungan antara pendidikan dan politik.

Hubungan antara politik dan pendidikan terwujud kedalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, sesuai karakteristik setting sosial politik di mana hubungan itu terjadi. Bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dalam suatu masyarakat hubungan tersebut bisa saja sangat kuat dan riil, dan dalam masyarakat lainnya hubungan tersebut bisa saja lemah dan tidak nyata. Pada hubungan antara pendidikan dan politik di negara-negara berkembang berbeda-beda dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Dalam masyarakat yang lebih primitif, yang berdasarkan pada basis kesukuan misalnya, adalah lazim bagi orang tua dari satu suku memainkan dua peran, sebagai pemimpin politik dan sebagai pendidik. Mereka membuat keputusan-keputusan penting dan memastikan bahwa keputusan itu diimplementasikan dan diterapkan. Mereka juga mempersiapkan generasi muda untuk memasuki kehidupan dewasa dengan mengajarkan mereka teknik-teknik berburu, dan mencari ikan, metode berperang dan sebagainya. Mereka juga menanamkan pada generasi muda mereka kepercayaan, nilai-nilai dan tradisi, dan mempersiapkan mereka untuk berperan secara politik (M Sirozi, 2001: 5).

Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi, dan mengadopsi nilai-nilai dan lembaga Barat, pola hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari tradisional ke pola modern. Di banyak negara berkembang, dimana pengaruh modernisasi sangat kuat, pola hubungan pendidikan dan politik umumnya sama dengan pola

hubungan politik dan pendidikan di negara-negara Barat. Ada satu perbedaan bahwa di negara-negara berkembang yang lebih maju, pendidikan formal memainkan peran yang sangat penting dan nyata dalam mencapai perubahan politik, dan dalam proses rekrutmen dan pelatihan pemimpin dan elite politik baru. Di sebagian negara maju, pendidikan berada dalam arus utama kehidupan politik nasional dan menjadi isu penting dalam wacana politik. Di negara-negara lain, persoalan kebijakan pendidikan kurang mendapat perhatian atau bukan merupakan topik yang hangat dalam wacana publik.

Dalam masyarakat modern pada umumnya, pendidikan adalah komoditi politik yang sangat penting. Proses dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki aspek dan wajah politik yang banyak, serta memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak pada sistem politik, stabilitas dan praktik sehari-harinya. Dalam masyarakat modern pendidikan merupakan wilayah tanggung jawab pemerintah. Pendidikan publik bersifat politis karena dikontrol oleh pemerintah dan mempengaruhi kredibilitas pemerintah. Karena besarnya nuansa politik dari kebijakan-kebijakan pendidikan, maka berbagai faktor politis yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan turut mempengaruhi bagaimana kontrol terhadap pendidikan dan bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan dibuat. Sebagai wilayah tanggung jawab pemerintah, pendidikan sering dipaksa menyesuaikan diri dengan pola-pola administrasi umum dan norma-norma yang berlaku. Akibatnya pendidikan publik dibiayai dan dikontrol oleh pemerintah. Seperti pemerintah membiayai dan mengontrol bidang-bidang lainnya, seperti pertanian, kesehatan, atau pelayanan sosial.

Karena kuatnya kaitan antara masalah pendidikan dan politik serta aspek-aspek publik lainnya, setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada umumnya merefleksikan pandangannya tentang masyarakat dan keyakinan politiknya. Masing-masing pemerintah menempatkan prioritas pendidikan yang berbeda-beda, dan menyukai kebijakan-kebijakan yang merefleksikan pandangan dasar dan kepentingan-kepentingan mereka. Dari waktu ke waktu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pendidikan atas dasar pertimbangan-pertimbangan politik. Keputusan-keputusan tentang pendidikan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan yang dihadapi oleh pemerintah. Sekolah-sekolah, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan negeri merupakan sektor publik yang paling terpengaruh oleh penerapan sistem politik. Ini tidak berarti bahwa lembaga-

lembaga pendidikan nonpemerintah tidak terpengaruh oleh keputusan-keputusan dan kontrol pemerintah. Karena pada umumnya sekolah-sekolah nonpemerintah sangat tergantung pada subsidi negara, maka untuk mendapatkan subsidi pemerintah, sekolah-sekolah nonpemerintah tersebut sering kali diharuskan oleh pemegang otoritas pendidikan untuk memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti menyesuaikan struktur organisasi sekolah, merombak kurikulum, kriteria pengangkatan guru, prosedur pengelolaan dana, format akreditasi, tidak memasukkan bidang studi tertentu, tidak menggunakan buku pelajaran tertentu, menggunakan seragam sekolah, melaksanakan upacara tertentu dan sebagainya.

Sekolah-sekolah nonpemerintah yang sangat tergantung pada izin dan subsidi pemerintah tidak punya banyak pilihan selain mengikuti semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun dengan begitu tidak sedikit dari sekolah-sekolah tersebut harus “kehilangan identitas” atau terpaksa lari dari visi, misi, dan tujuan awal pendiriannya. Di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, sangat sedikit sekolah nonpemerintah yang dapat meloloskan diri dari jerat politik pendidikan penguasa (M Sirozi, 2001: 7).

Jika politik dipahami sebagai praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi sumber daya dan nilai-nilai sosial (Harman, 1974: 9), maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik. Semua lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun nonpemerintah, dalam batas-batas tertentu tidak terlepas dari bisnis pembuatan keputusan-keputusan yang disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas. Dengan kata lain, politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai sistem-sistem politik mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-sistem politik. Tentu saja aktivitas politik di sebuah sekolah dasar yang kecil dalam banyak hal kurang penting dibandingkan dengan aktivitas politik di Departemen Pendidikan. Namun, pada hakikatnya aktivitas politik di dua lembaga pendidikan tersebut sama saja jenisnya. Sebuah keputusan yang dibuat dalam rapat guru sekolah mengimplementasikan sebuah program pengajaran baru sama politisnya dengan sebuah keputusan yang dibuat oleh Departemen Pendidikan

dalam rangka mengalokasikan sejumlah dana bantuan untuk sekolah-sekolah tertentu. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.

Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai berkembang dalam wacana publik. Walaupun belum menjadi bidang kajian akademik. Publikasi yang menggunakan tema pendidikan dan politik belum tampak ke permukaan. Kalaupun ada fokus bahasannya belum begitu menyentuh aspek-aspek substantif hubungan politik dan pendidikan. Namun, masih di seputar aspek-aspek ideologis politik pendidikan. Namun demikian keyakinan akan adanya hubungan yang erat antara pendidikan dan politik tampaknya sudah mulai tumbuh.

“Politics is inseparable from education, unless the country plans to generate illiterate politicians’ who could not be expected to lead the republic out of the current crises”. Politik tidak terpisahkan dari pendidikan kecuali jika negeri ini ingin memiliki generasi yang buta politik, yang tidak bisa diharapkan untuk mengeluarkan negeri ini dari krisis (Muchtar Buchori, dalam *The Jakarta Post* edisi 16 Maret 2001). Lebih lanjut Buchori menyatakan, *“you cannot escape politics or separate it from education”* (Anda tidak dapat lari dari politik atau memisahkannya dari pendidikan).

Buchori menambahkan bahwa *“politics is the way to manage the broad environment, and not merely a struggle for power. Therefore it is the duty of schools to help students differentiate between good politics and bad politics”*. (politik adalah cara untuk mengelola lingkungan yang luas, bukan hanya perebutan kekuasaan. Maka, adalah tugas sekolah untuk membantu para siswa untuk dapat membedakan antara politik baik dan politik tidak baik). Berbicara dalam konteks Indonesia, Buchori percaya bahwa pendidikan yang tidak bermutu adalah salah satu sumber krisis di negeri ini. Dia menjelaskan lebih jauh bahwa krisis yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, bersumber dari akumulasi keputusan-keputusan politik yang tidak tepat yang terjadi pada masa lalu. Dia menambahkan *“Pada masa lalu kita mempunyai generasi pemimpin politik yang membawa bangsa ini pada kemerdekaan. Akan tetapi, akhirnya kita melihat suatu generasi yang membuat keputusan-keputusan politik yang menyesatkan”*.

Ketika ditanya apakah politik harus memasuki wilayah pendidikan atau sebaliknya, Buchori mengatakan bahwa para mahasiswa harus belajar tentang tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*). Dia menegaskan “Inilah yang saya maksud dengan ketidakterpisahan antara politik dan pendidikan. Para mahasiswa lanjutnya, tidak boleh acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yang berlangsung di luar lingkungan perguruan tinggi. Buchori menambahkan, “pemisahan antara politik dan pendidikan diberlakukan pada masa 30 tahun kekuasaan Soeharto yang otoriter”. Pada masa tersebut, tandasnya, politik digambarkan sebagai sesuatu yang kotor dan gambaran tersebut masih berkembang sampai saat ini. Ia menyimpulkan “kita tidak akan pernah bisa lari dari politik”. Politik adalah realitas kehidupan. Mari berpolitik secara bijak. Persoalannya adalah bagaimana menangani para politisi yang buta politik. Sejalan dengan Buchori, Direktur Eksekutif Asia Foundation, Remage, yang menjadi salah seorang pembicara dalam seminar tersebut mengatakan, “memasukkan politik ke dalam ruang kelas adalah hal biasa”. Ia menambahkan bahwa sistem pendidikan yang memandang politik sebagai sesuatu yang kotor membuat banyak orang tidak mau menjadi politisi. Jika ini terus berlanjut, kata Remage, Indonesia akan dipimpin oleh para pengamat politik (M Sirozi, 2001: 8).

Dari beberapa pemikiran yang berkembang dalam seminar tersebut dapat ditarik beberapa pemahaman. *Pertama*, adanya kesadaran tentang hubungan antara pendidikan dan politik. *Kedua*, adanya kesadaran akan peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik. *Ketiga*, adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik. *Keempat*, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik. *Kelima*, pentingnya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Ungkapan-ungkapan Muchtar Buchori khususnya menggambarkan suatu keyakinan terhadap hubungan erat antara pendidikan dan politik. Ia juga yakin bahwa hubungan tersebut tidak mungkin terputus begitu saja karena membawa pengaruh substantif terhadap keduanya. dalam proses pendidikan, Buchori tampaknya sangat yakin bahwa, pendidikan dan politik perlu diintegrasikan untuk dapat melahirkan para pemimpin politik yang berkualitas.

Walaupun hanya merepresentasikan opini segelintir sarjana di negeri ini, wacana hubungan antara politik dan pendidikan dan pokok-pokok pikiran yang berkembang

dalam seminar tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan positif dalam melihat hubungan antara politik dan pendidikan pada umumnya dan politik pendidikan pada khususnya. Namun demikian harus diakui bahwa hingga saat ini kajian politik pendidikan masih merupakan barang langka di negeri ini. Kajian politik pendidikan masih jarang terdengar di pusat-pusat studi kependidikan di negeri ini..

Namun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa kesadaran akan keterkaitan antara pendidikan dan politik tidak ada sama sekali. Beberapa seminar dan kongres kependidikan nasional maupun internasional di beberapa kota besar negeri ini memperlihatkan perhatian yang besar dari para peserta dan pembicara terhadap hubungan antara pendidikan dan politik. Diskusi tentang berbagai isu fundamental tentang pendidikan sering kali mengungkapkan aspek-aspek dan hambatan-hambatan yang bersifat politik dalam perkembangan sistem pendidikan di negeri ini. Misalnya, kecilnya alokasi dana untuk pendidikan dan rendahnya mutu pendidikan di negeri ini sering kali diyakini sebagai implikasi dari rendahnya komitmen politik pemerintah.

Pada saatnya nanti kajian politik pendidikan diharapkan terus diminati dan berkembang di pusat-pusat studi kependidikan di negeri ini sehingga wacana kependidikan di tanah air tidak hanya terbatas pada isu-isu metode dan materi pembelajaran, tetapi juga menyentuh konteks sosio-politis dari isu-isu tersebut.

Dalam dua dekade terakhir, memasuki abad ke-21 dan pemberlakuan otonomi daerah, lingkungan politik pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan penting. Perubahan tersebut ditandai oleh paling tidak tiga kecenderungan utama. *Pertama*, terjadinya perubahan peranan pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan pendidikan. Proses kebijakan pendidikan yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah pusat, saat ini sudah mulai didistribusikan ke daerah. *Kedua*, semakin terfragmentasinya pendidikan, baik secara politik maupun dalam bentuk program. *Ketiga*, munculnya kembali kepentingan-kepentingan nonkependidikan, terutama dari dunia bisnis, dalam wilayah pendidikan. Berbeda dengan tahun 1970-an ketika politik pendidikan adalah wilayah kepentingan seperti departemen pendidikan, kepala sekolah, administrator dan guru, mulai tahun 1980-an dunia pendidikan didominasi oleh tokoh-tokoh bisnis dan pegawai publik yang terpilih (M Sirozi, 2001: 8).

Ideologi Pendidikan

1) Pengertian Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem gagasan yang mendukung seperangkat norma sosial. Adat istiadat yang menjadi tatanan yang membentuk norma kehidupan sosial merupakan salah satu unsur Ideologi. Secara umum ideologi merupakan pandangan hidup, falsafah. Ideologi terdiri dari beberapa elemen, antara lain gagasan, kepercayaan, sistem nilai, karakter ideal, kode etik, dan sebagainya. Menurut Partson ideologi adalah suatu sistem kepercayaan dan gagasan yang di dalamnya mengandung upaya tafsiran terhadap kolektivitas dan kenyataan yang dihadapi. Hubungan antara ideologi, gagasan, dan kepercayaan terlihat dengan adanya aksi saling pengaruh di antara fenomena tersebut. Menurut Levebuure (dalam Weaning, 1984) ideologi memiliki beberapa ciri seperti berikut:

1. Ideologi tidak mencerminkan realitas secara utuh tetapi hanya menggambarkan realitas yang parsial yang terfragmentasi.
2. Berdasarkan prakonsepsi tertentu yang dimiliki oleh kelompok atau kelas yang berkuasa.
3. Realitas yang terdistorsi dan dicitrakan oleh ideologi dikembangkan dan didefinisikan kembali melalui proses sejarah yang juga dipengaruhi oleh pembentukan dan modifikasi ideologi. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara ideologi dan proses sejarah.
4. Ideologi dapat mempengaruhi kehidupan nyata individu dengan mengatur dan memberikan batasan-batasan terhadap aktivitas keseharian manusia. Dengan demikian ideologi menggunakan kehidupan dan bahasa sehari-hari sebagai sarana untuk mempengaruhi pengalaman nyata manusia. Ideologi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, oleh karena itu pengaruhnya tidak dirasakan sebagai suatu paksaan. Dengan cara ini ideologi menyediakan suatu cara hidup dan cara pandang untuk menghadapi dunia nyata, tetapi cara pandang dan cara hidup itu sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan.
5. Ideologi memberi dukungan dan legitimasi terhadap situasi dan aktivitas tertentu yang memberi dukungan kepada kelompok yang dominan.

Ideologi adalah manifestasi bekerjanya sistem dan proses kekuasaan. Ideologi

melalui suatu proses sejarah yang panjang yang memerlukan suatu kondisi agar kelompok atau individu yang dikuasai seolah-olah menerima hubungan dominansi yang ada. Ketika kekuasaan itu sedemikian merasuk dan ideologi diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, seakan-akan terjadi konsensus antara kelompok atau pihak yang ter subordinasi dan penguasa. Kondisi ini disebut oleh Gramsci sebagai timbulnya ideologi yang hegemonis. Gramsci (1971) mengemukakan bahwa ideologi yang hegemonis merupakan titik klimaks dari kemampuan serangkaian ide atau pendapat dari kelompok yang berkuasa untuk mempengaruhi keseluruhan elemen yang ada dalam masyarakat. Ideologi yang hegemonis tersebut menciptakan massa yang spontan terhadap ide atau nilai kelompok yang dominan. Ideologi yang hegemonis menembus kehidupan sehari-hari dan kesadaran manusia sehingga menjadi bagian dari *common sense*. Karena pengaruh ideologi yang hegemonis tersebut manusia menjadi tidak kritis.

2) Ideologi Pendidikan

Adalah suatu fakta bahwa dalam praktek penyelenggaraan pendidikan dalam suatu masyarakat dilatarbelakangi oleh filosofi, nilai, norma ataupun suatu prinsip-prinsip yang dipilih oleh masyarakat atau pihak-pihak yang berkuasa di suatu negara. Negara yang merupakan institusi hasil kontrak sosial memiliki tugas memberi pelayanan terhadap warga negara, bekerja atas dasar filosofi, nilai ataupun prinsip-prinsip yang terpilih tersebut. Hal ini terjadi sebab proses dan praktek pendidikan merupakan bagian dari bentuk aktualisasi atas keinginan-keinginan masyarakat dalam mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan (*social ideals*).

Untuk mewujudkan "*social ideals*" tersebut maka pihak penyelenggara pendidikan pada prinsipnya mempunyai dua peran penting. *Pertama*, proses pendidikan sebagai lembaga yang mentransmisikan nilai-nilai, sistem sosial, maupun struktur sosial yang ada. *Kedua*, tujuan yang sebenarnya dari pendidikan adalah berperan untuk membangun atau merubah tatanan yang ada ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih adil. Kedua peran inilah yang selalu menjadi permasalahan di dunia pendidikan, sebab keduanya relatif sering bertentangan. Pada satu sisi lembaga pendidikan dianggap alat dan tempat yang sangat strategis untuk mempertahankan nilai-nilai, budaya atau kebijakan-kebijakan yang telah terpola, di sisi lain lembaga ini pun mempunyai misi

untuk perubahan, kebebasan, dan keadilan. Adanya perbedaan ini sebenarnya merupakan refleksi dan kehendak cita-cita sosial yang berbeda dari suatu masyarakat.

Pada dasarnya perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan ideologi yang digunakan oleh masing-masing masyarakat (O'Neil, 2001). Ideologi sebagai sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Dalam hal ini ideologi berupaya menggambarkan mengenai karakteristik-karakteristik umum tentang alam dan masyarakat, serta keterkaitan antar hakikat dunia dengan hakikat moral, politik, dan panduan-panduan perilaku lainnya yang bersifat evaluatif. Oleh karenanya, ia tidak sekedar memberi informasi tentang dunia ini sebenarnya, tetapi juga merupakan petunjuk yang bersifat imperatif bagaimana sebenarnya manusia/masyarakat bertindak, termasuk lembaga pendidikannya.

Prinsip dan petunjuk nilai yang bersifat imperatif sekaligus evaluatif tersebut akhirnya mempengaruhi bagaimana tatanan atau struktur sosial masyarakat dibangun. Dengan kata lain, ideologi sosial suatu masyarakat mempengaruhi formasi sosial atau lembaga yang hendak diwujudkan oleh masyarakat tersebut. Sebagai contoh bila suatu masyarakat (negara) menganut ideologis komunis maka akan berupaya membentuk formasi sosial masyarakatnya menjadi bersifat komunis pula dan praktek-praktek penyelenggaraan negara mengarah pada corak yang mencerminkan ideologi komunis tersebut, tak terkecuali praktek-praktek yang diselenggarakan di dunia pendidikan. Demikian pula bila suatu negara menganut ideologi liberal maka akan berusaha menjadikan setiap tatanan sosial masyarakatnya mewujudkan bentuk liberalis.

Menelusuri ideologi pendidikan, ternyata cukup bervariasi bentuknya yang dipakai dalam praktek pendidikan di beberapa negara. Namun, bila dikelompokkan dapat dibagi menjadi ideologi konservatif dan ideologi liberal (O'Neil, 2001).

3) Ideologi Konservatif

Paham ideologi ini memandang, bahwa ketidaksederajatan masyarakat merupakan suatu hukum alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah. Perubahan sosial bagi penganut paham ini bukanlah suatu yang harus diperjuangkan, karena perubahan hanya akan membuat manusia lebih sengsara saja. Dalam bentuknya yang paling klasik, kaum konservatif berkeyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak bisa merencanakan perubahan atau paling tidak mempengaruhi

perubahan sosial. Perubahan terjadi secara alami dan mengalami tahapan evolusi. Masyarakat di mata kaum konservatif tidak menganggap rakyat memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk merubah kondisi mereka.

Dalam paham ideologi konservatif peranan lembaga pendidikan bukanlah sebagai perubahan tatanan sosial, tetapi lebih pada pelanggaran sistem sosial, nilai dan budaya yang telah ada. Dalam kondisi ini peraturan-peraturan yang ada di lembaga tersebut dibuat sangat ketat dan tersentralisir serta dikontrol pelaksanaannya dengan sangat efektif, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan cepat dapat diidentifikasi. Dalam kondisi ini, penyelenggara pendidikan cenderung menjadi alat pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang disusun sesuai dengan ideologi yang ditetapkan. Peluang untuk berkreasi dan memodifikasi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan termasuk proses belajar mengajar di dalam kelas seakan tertutup. Nilai kepatuhan sangat tinggi sedang nilai-nilai yang mendorong berpikir kritis dan kreatif sangat rendah.

4) Ideologi Liberal

Penganut ideologi ini berangkat dari keyakinan bahwa dalam masyarakat terjadi banyak masalah termasuk urusan pendidikan, namun masalah dalam pendidikan tidak berkaitan langsung dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Sehingga tugas pendidikan tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan politik dan ekonomi. Namun demikian, proses pendidikan tidak bisa lepas sama sekali dengan kondisi-kondisi eksternal tersebut. Tetap ikut menyesuaikan diri dengan kemajuan dan perubahan yang ada, seperti dalam hal sarana prasarana yang *up to date*, ruang kelas yang ketercukupan serta penataannya sesuai dengan yang berkembang; perpustakaan yang terus menerus melengkapi buku-bukunya dengan koleksi terbaru; laboratorium yang modern dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa; peralatan komputer yang lengkap dan mengikuti *trend* perkembangan; multi media yang mampu mempermudah pemahaman dan mendorong minat siswa untuk maju. Begitu juga dengan kurikulum yang digunakan, selalu terus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan dunia kerja. Selanjutnya manajemen pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada prestasi dan pembaharuan terus dilaksanakan. Kaum liberal menghendaki bahwa pendidikan harus lepas dari dominasi politik, sebab pendidikan

dimaksud sebagai media mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai dan keyakinan agar masyarakat luas dapat berfungsi sebagai suatu sistem dengan baik. Dalam hal ini lembaga pendidikan harus diberi otonomi untuk dapat mengembangkan potensi-potensi mereka dan berhak menentukan diri sendiri.

Ideologi yang dipakai suatu negara akan mempengaruhi ideologi yang dipakai oleh lembaga pendidikan, yang kemudian berkembang kepada paradigma pendidikan yang dianutnya. Pada dasarnya pendidikan berperan sangat strategis bagi pembangunan suatu bangsa. Seperti yang dikemukakan oleh John C. Bock (dalam Zamroni, 2001) bahwa peran pendidikan antara lain: (1) Memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa; (2) Mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial; dan (3) Untuk merasakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran lainnya merupakan fungsi ekonomi.

Berkaitan dengan peran pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yaitu paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap modern. Menurut pengalaman negara-negara di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, serta menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis *Human Investment*, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki *economic rate of return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.

Sejalan dengan paradigma fungsional, paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah (1) Mengembangkan kompetensi individu; (2) Kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas; dan (3) Secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya

warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.

Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi telah melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan paling tidak dalam dua hal. *Pertama*, telah melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analitis mekanis dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan yang lain. Mekanis melihat bahwa pecahan-pecahan atau bagian-bagian yang tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional, satu bagian menentukan bagian yang lain secara langsung. Akibatnya, pendidikan telah direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil yang satu dengan yang lain menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah, dan latihan-latihan. Suatu sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan serpihan-serpihan tersebut, seperti nilai, indeks prestasi, ranking, rata-rata nilai, ijazah.

Paradigma pendidikan *input-output*, telah menjadikan lembaga pendidikan (sekolah) bagaikan proses produksi (Zamroni, 2001). Murid diperlakukan bagaikan *raw-input* dalam suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitas diperlakukan sebagai *instrumental input*. Jika *raw-input* dan *instrumental input* baik, maka akan menghasilkan proses yang baik dan akhirnya baik pula produk yang dihasilkan. Kelemahan paradigma pendidikan tersebut nampak jelas, yakni dunia pendidikan diperlakukan sebagai sistem yang bersifat mekanik yang perbaikannya bisa bersifat parsial, bagian mana yang dianggap tidak baik. Asumsi tersebut dapat dikatakan jauh dari realitas kebenaran. Implikasinya, sistem dan praktek pendidikan yang mendasarkan pada paradigma pendidikan yang keliru cenderung tidak akan sesuai dengan realitas. Paradigma pendidikan tersebut di atas tidak pernah melihat pendidikan sebagai bagian dari proses kehidupan masyarakat secara totalitas.

Kedua, paradigma pengambilan kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai *engine of growth*, penggerak dan loko pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan maka pendidikan harus mampu menghasilkan *invention* dan *innovation*,

yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Agar keberhasilan melaksanakan fungsinya, maka pendidikan harus diorganisir dalam suatu lembaga pendidikan sistem persekolah, yang bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi. Bahkan pendidikan harus menjadi panutan dan penentu perkembangan dunia yang lain, khususnya, dan bukan sebaliknya perkembangan ekonomi menentukan perkembangan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan formal inilah berbagai ide dan gagasan akan dikaji, berbagai teori akan diuji, berbagai teknik dan metode akan dikembangkan, dan tenaga kerja dengan berbagai jenis kemampuan akan dilatih. Sesuai dengan peran pendidikan sebagai *engine of growth*, dan penentu bagi perkembangan masyarakat, maka bentuk sistem pendidikan yang paling tepat adalah *single track* dan diorganisir secara terpusat, sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan yang sesuai dengan ideologi dan kebijakan penguasa negara.

Hegemoni dalam Pendidikan

Dalam teori hegemoni dari Gramsci (dalam Nezar dan Andi, 1999) dikemukakan selama negara dengan kekuatan represif, negara sesungguhnya juga menjalankan kekuatan hegemonik melalui ideologi yang mampu melanggengkan kekuasaannya. Salah satunya adalah melalui lembaga pendidikan. Lembaga ini dianggap sangat strategis karena memiliki fungsi utama dalam mentransformasikan segenap pengetahuan kognitif (*cognitive knowledge*), nilai-nilai (*values*), dan keterampilan (*skill*), kepada pada peserta didik. Muatan-muatan kognitif dan nilai-nilai inilah sesungguhnya dapat dimasuki dan diisi muatan ideologis oleh kelompok dominan (penguasa negara) yang selanjutnya lembaga pendidikan/persekolahan dipaksa untuk bersedia menanamkan muatan ideologi dan kepentingan negara.

Hegemoni negara menunjukkan pada sebuah kepemimpinan dari suatu penguasa negara yang mendominasi. Supremasi kelompok ini mewujudkan diri dalam dua cara sebagai “dominasi” dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral. Di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk menundukkan mereka, bahkan dengan menggunakan alat-alat kekuatan, di lain pihak, kelompok sosial memimpin kelompok kerabat dan sekutu mereka (Gramsci dalam Nezar dan Andi, 1999). Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekkan

kekuasaan, bahkan ketika dia memegang kekuasaan. Hal ini menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep: Kepemimpinan (*direction*) dan dominasi (*dominance*). *Pertama*, dominasi dijalankan atas seluruh lawan (oposisi/musuh), dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu-sekutu. *Kedua*, kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk menaklukkan aparatur negara, atau dalam pengertian sempit kekuasaan pemerintahan. Dan, *ketiga*, sekalipun kekuasaan negara dapat dicapai, dua aspek supremasi, yaitu kepemimpinan/pengarahannya dan dominasi, terus berlanjut.

”Gramsci (dalam Nezar dan Andi, 1999) mengakui bahwa dalam masyarakat memang selalu ada yang memerintah dan yang diperintah. Bertolak dari kondisi ini, beliau melihat, jika pemimpin akan memerintah dengan efektif, maka jalan yang dipilih adalah meminimalisasi resistensi rakyat dan bersamaan dengan itu pemimpin harus menciptakan ketaatan yang spontan dari yang diperintah. Secara ringkas Gramsci memformulasikan sebuah kalimat, “bagaimana caranya menciptakan hegemoni”.

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimpangan melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakekatnya adalah upaya menggiring orang menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan (Farida Hanum, 2004). Dalam konteks ini Gramsci merumuskan konsepnya yang merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik, dalam terminologinya “momen” di mana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dan realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan, pengaruh dari “roh” ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik, dan hal-hal yang menunjukkan pada moral. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator (Williams, 1960).

Hegemoni juga menunjuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya (Bellamy, 1990). Sebagai contoh kapitalisme masih bertahan karena buruh menerima keadaan umum tersebut, dominasi budaya borjuis membuat penggunaan kekuatan politik tak perlu untuk

mempertahankan kekuasaan. Sebab para anggota yang dipimpin (kelompok yang terhegemoni) mengikuti kemauan penguasa tanpa daya kritis.

Hegemoni kelas yang berkuasa terhadap kelas yang dikuasai, sesungguhnya dibangun oleh mekanisme konsensus. Ketika Gramsci berbicara tentang konsensus, ia selalu mengkaitkan dengan spontanitas bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosio politis ataupun aspek-aspek aturan yang lain. Tataran hegemonis, tidak perlu masuk ke dalam institusi (lembaga) ataupun praktek liberal sebab hegemoni pada dasarnya merupakan suatu totalitarianisme dalam arti ketat. Femia (via Hendaro, 1993) menangkap tiga kategori penyesuaian yang berbeda yang dikemukakan Gramsci, yaitu karena rasa takut, karena terbiasa, dan karena persetujuan. Tipe yang terakhir inilah yang kemudian disebutnya sebagai Hegemoni. Adapun ketiga kategori itu meliputi: (1) Orang menyesuaikan diri mungkin karena takut akan konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikan. Di sini konformitas ditempuh melalui penekanan dan sanksi-sanksi yang menakutkan; (2) Orang menyesuaikan diri mungkin karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu. Konformitas dalam hal ini merupakan soal partisipasi yang tidak terefleksi dalam hal bentuk aktivitas yang tetap, sebab orang menganut pola-pola tingkah laku tertentu dan jarang dimungkinkan untuk menolak; (3) Konformitas yang muncul dari tingkah laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat (Farida Hanum, 2004) Farida Hanum. 2004. *Hegemoni Pendidikan*. Jurnal Fondasia. Fakultas Ilmu Pendidikan. UNY. Yogyakarta.

Pendidikan di Indonesia telah begitu lama terhegemoni oleh negara, hampir seluruh perangkat yang berkaitan dengan proses negara harus dikontrol negara. A Waidl (2000) dalam tulisannya mengungkapkan ada beberapa bentuk kontrol negara yang paling jelas dapat dilihat.

Pertama, sebagai konsekuensi, ketetapan sentralisasi kurikulum, materi, dan referensi proses pendidikan dirumuskan oleh negara. Masyarakat tidak berhak usul untuk pemberdayaan pendidikan, karena yang paling tahu kebutuhan masyarakat adalah negara. Tidak penting apakah isi kurikulum mengingkari individualitas, karena yang dipentingkan adalah komunalisme bernegara. Untuk mengokohkan kontrol atas materi, negara menciptakan mata pelajaran yang bersifat ideologis yang sesuai dengan yang

diinginkan negara, seperti pengalaman panjang di materi PMP. Sejarah Nasional, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Cara berpikir tentang kehidupan politik tidak boleh merupakan wacana alternatif di luar yang ditetapkan negara. Sehingga peserta didik diajak meyakini dan meresapi materi yang berisi ideologi yang diarahkan negara. Dalam kurikulum yang sudah tersentralisir ini, metode yang digunakan dalam pendidikan tidak boleh berpotensi menjadi embrio perlawanan terhadap negara. Semua harus diarahkan pada ketundukan kepada negara secara total. Walaupun metode belajar mengajar bervariasi namun cara berpikir sudah terkooptasi dalam ideologi integralistik negara. Karena pendidikan ditujukan bagi suksesnya kehendak negara, dengan sendirinya pendidikan bukan merupakan upaya pemberdayaan yang ditujukan kepada peserta. Siswa bukan merupakan subyek pendidikan yang dikembangkan kemampuannya, melainkan sebagai obyek program negara yang bernama pendidikan, yang penting adalah kepatuhan dan loyalitas.

Kedua, guru bukanlah manusia yang bebas mengajarkan sesuatu yang diyakininya, melainkan ia harus merupakan agen yang menyampaikan keinginan-keinginan negara melalui bahan ajar yang diberikan terutama mata pelajaran yang sarat dengan ideologi negara. Untuk mencapai maksud tersebut, sejak awal guru harus “dibina” dan “didisiplinkan” dengan peraturan-peraturan. Loyalitasnya pada negara dituntut tanpa *reserve*, sehingga guru sangat takut pada atasannya yang mengurus nasib mereka (dalam hal ini, Kanwil Departemen Pendidikan). Cara seperti ini memang efektif untuk mensosialisasikan pandangan negara. Akibatnya, guru lebih banyak menekan kebebasan ekspresi siswa, sebab guru sendiri ditekan untuk berekspresi. Guru merupakan wakil negara dan aparat negara di dalam kelas. Jika sudah demikian, pendidikan bukan merupakan wahana saling belajar antara guru dan siswa sebagai civitas pengetahuan untuk mencapai kebaikan masa depan, melainkan wahana penindasan dari kelompok dominan. Harapan pendidikan sebagai latihan kebebasan dan keadilan nampaknya menjadi mustahil (Farida Hanum, 2004).

Tidak puas dengan kontrol terhadap sistem, kurikulum, dan guru, negara masih melakukan kontrol langsung dalam proses pendidikan itu sendiri. Negara ikut mengawasi diskusi-diskusi dan segala bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan civitas akademika termasuk mahasiswa. Jika momen ilmiah dianggap mengganggu berlangsungnya

kekuasaan, negara akan langsung turun tangan menertibkan. Walaupun kondisi saat ini sedikit demi sedikit telah terjadi perubahan sejak reformasi dan pergantian beberapa kepala pemerintahan, namun hegemoni negara yang begitu kuat dan dalam telah tertanam dalam dunia pendidikan masih susah untuk dilepas, karena menjadi bagian dari tingkah laku mereka yang ada di dalamnya. Seperti yang dikemukakan Femia (Hendarto, 1993) pada awalnya kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan karena ada penekanan dan sanksi yang menakutkan, kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi kesadaran akan suatu konsensus yang harus dijalankan. Inilah yang disebut oleh Gramsci sebagai Hegemoni Negara.

”Pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan dalam sejarahnya selalu berhubungan dengan kekuatan negara. Meskipun keduanya mengalami perubahan dalam periode sejarah, namun keduanya selalu menjalani persinggungan, baik mengarah kepada bentuk persinggungan yang bersifat sinergis ataupun berbentuk eksploitatif. Persinggungan antar keduanya bersumber dari suatu cita-cita ideal masyarakat dan pendidikan yang hendak dibangun, itulah sebabnya pendidikan yang dilaksanakan banyak diwarnai oleh corak ideologi suatu negara” (Farida Hanum, 2004).

Ketika penguasa menggunakan ideologi untuk membentuk kepatuhan masyarakat, maka ideologi tersebut telah berubah menjadi hegemoni. Hegemoni merupakan bentuk penguasaan kepada masyarakat melalui cara-cara yang tidak disadari oleh masyarakat. Kepatuhan itu dibangun melalui nilai-nilai moral yang diciptakan negara (penguasa) dan ditanamkan dengan cara-cara intelektual, sehingga masyarakat tanpa sadar mematuhi sebagai bentuk konsensus atau kontrak sosial demi kehidupan bersama. Menurut Gramsci pendidikan dan mekanisme kelembagaan seperti sekolah, partai-partai politik, media massa menjadi “tangan-tangan” kelompok elite yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang dominan yang menjadikan masyarakat terhegemoni.

Di Indonesia lembaga pendidikan telah cukup lama merasakan hegemoni negara tersebut, terutama pada masa Orde Baru. Banyak cara dilakukan negara mulai dari undang-undang, kurikulum yang tersentralisasi dan dibuat ahli yang dipilih negara, membina dan mendisiplinkan guru agar loyal pada negara sampai peran negara menginteli kegiatan dan aktivitas di lembaga pendidikan walaupun reformasi telah muncul ternyata sulit untuk merubahnya dengan cepat (Farida Hanum, 2004) Farida

Hanum. 2004. *Hegemoni Pendidikan*. Jurnal Fondasia. Fakultas Ilmu Pendidikan. UNY. Yogyakarta.

Politik Pendidikan dan Kurikulum

Kurikulum diartikan oleh para pengembangnya sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Misalnya, Hilda Taba mengartikan kurikulum sebagai “*a plan for learning; therefore, what is known about the learning process and development of the individual has bearing on the shaping of curriculum*”. Orlosky and Smith mengartikan kurikulum sebagai “*the substance of the school program. It is the content pupils are expected to learn*”. Caswell and Campbell mendefinisikan kurikulum sebagai “*all of the experiences children have under the guidance of teachers*” (Taba Hilda, 1962). Sementara itu, menurut PP 19 tahun 2005 kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).

Berdasarkan pengertian-pengertian kurikulum di atas dapat dikatakan bahwa kurikulum dapat berarti rencana pembelajaran, program sekolah, dan pengalaman belajar. Pengertian kurikulum sangat tergantung dari kepentingan para penggunanya. Depdiknas menggunakan terminologi kurikulum, sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian tersebut muncul, karena pihak Depdiknas memposisikan kurikulum sebagai pedoman pembelajaran dan berlaku di sekolah.

Pengertian kurikulum yang dianut ahli dan pengembang kurikulum sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek kurikulum yang dikembangkan. Jika kita sepakat dengan pernyataan tersebut, ada kemungkinan suatu institusi pendidikan yang sama mengembangkan aspek-aspek kurikulum yang berbeda karena beda pengertian kurikulum yang digunakan. Demikian pula, kita mungkin akan menemukan variasi-variasi model pengembangan kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah yang disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang para pengembangnya terhadap konsep kurikulum.

Pada hakekatnya pendidikan berintikan interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi edukatif tersebut bertujuan untuk mewujudkan aspek-aspek kurikulum yang berlaku menuju pada tercapainya tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Interaksi edukatif tersebut juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, di mana kegiatan pendidikan terjadi. Kurikulum dapat dikatakan sebagai jantungnya kegiatan pendidikan. Artinya, aktivitas edukasi antara pendidik dengan peserta didik sangat dipengaruhi oleh muatan-muatan yang ada dalam kurikulum. Tanpa ada kurikulum, kiranya kegiatan pendidikan mustahil terjadi (Nana Syaodih S., 1988)

Kurikulum yang berlaku di suatu sekolah tentu saja sangat dipengaruhi oleh teori-teori pendidikan yang dipakai. Teori pendidikan yang dipakai tentu tak lepas dari aliran filsafat pendidikan yang dianutnya. *"The function of philosophy can be conceived as either (1) the base or starting point in curriculum development or (2) an interdependent function with other functions in curriculum development"*. Artinya, ketika seseorang hendak mengembangkan kurikulum seharusnya terlebih dahulu menetapkan aliran filsafat pendidikan mana yang hendak dijadikan landasannya. Setelah itu, kemudian mengembangkan berbagai aspek kurikulum dengan mengacu pada butir-butir filsafat pendidikan yang dianutnya (Ornstein dan Hunkins, 2004: 32).

Kita mengenal empat aliran filsafat, yaitu idealism, realism, pragmatism, dan eksistensialism. Dalam konteks pendidikan, menyebut ada empat filsafat pendidikan yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu perenialism, esensialism, progresivism, dan rekonstruksionism. Setiap aliran filsafat pendidikan tersebut memiliki akar filsafat tertentu, namun ada kalanya didukung oleh lebih dari satu akar filsafat. Contoh, perenialism berakar pada filsafat realism, esensialism berakar pada idealism dan realism, dan progresivism dan rekonstruksionism berakar pada filsafat pragmatism (Ornstein dan Hunkins, 2004: 33).

Perenialism merupakan aliran filsafat pendidikan tertua dan paling konservatif, memiliki akar filsafat realism. Pertanyaan yang diajukan dalam konteks pengembangan kurikulum adalah *"what is human nature?"* Manusia diyakini memiliki kemampuan memahami kebenaran universal. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan pikir manusia dan membuka tabir kebenaran universal melalui pelatihan intelektual.

Materi kurikulum terorganisir sebagaimana suatu disiplin ilmu (*body of knowledge*). Guru berperan sebagai ahli bidang studi, yang menguasai keilmuan sehingga mereka memiliki otorita di bidang ilmunya. Pola pembelajar dilakukan dengan metode ceramah. Siswa lebih diposisikan sebagai pihak penerima pengetahuan, sehingga ia lebih pasif dalam pembelajaran.

Esensialism memiliki akar filsafat idealism dan realism. Kurikulum sekolah harus dikembangkan dengan mengacu pada hal-hal yang esensial, misalnya membaca, menulis, dan berhitung. Penganut aliran filsafat esensialism menekankan penguasaan ketrampilan, pengetahuan, dan konsep-konsep yang esensial untuk penguasaan materi pembelajaran. Guru harus menguasai bidang studinya, sehingga ia diharapkan memiliki otorita di bidang ilmunya.

Progresivism merupakan aliran filsafat yang berseberangan dengan aliran filsafat perenialism. Progresivism merupakan aliran filsafat yang dikembangkan oleh sekelompok pemikir dan politisi yang berkembang di awal abad 20, yang menghendaki adanya perubahan dalam cara-cara pembelajaran yang menekankan siswa aktif dalam belajar. Cara-cara pembelajaran yang dikembangkan, antara lain; pemecahan masalah, penemuan, kooperatif. Kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan dengan metode tersebut diharapkan siswa dapat mengubah dunia ke tatanan kehidupan yang lebih baik.

Penganut aliran filsafat ini, misalnya Dewey dan kawan-kawan menekankan pada "*how to think*" dan bukan pada "*what to think*". Oleh karena itu, mereka menghendaki pengembangan materi kurikulum yang bersifat interdisipliner. Mata pelajaran lebih dipandang sebagai instrumen kegiatan pembelajaran daripada sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai fasilitator daripada sebagai satu-satunya sumber belajar.

Reconstructionism didasarkan atas ide-ide kehidupan masyarakat abad ke 19, yang berwawasan pada tata kehidupan lebih maju dan modern. Aliran filsafat ini menghendaki isi kurikulum dikembangkan atas dasar isu-isu sosial kemasyarakatan yang memuat pluralisme budaya, kesamaan, dan berwawasan ke depan. Siswa dipersiapkan untuk dapat hidup di era kehidupan yang penuh keragaman (*many nations*). Peran guru dan siswa dalam pembelajaran bisa berubah-ubah sesuai dengan fungsinya sesuai konteksnya.

Berdasarkan paparan di atas, aliran filsafat pendidikan mana yang dipakai dalam pengembangan kurikulum di Indonesia? Kita tak bisa mengatakan bahwa dalam pengembangan kurikulum yang berlaku mengikuti salah satu dari aliran-aliran filsafat pendidikan tersebut. Kita telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang diyakini dipakai sebagai landasan ideal dalam mengembangkan pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan di atas merupakan referensi bagi kita, ketika hendak mengembangkan aspek-aspek kurikulum dengan tetap memposisikan Pancasila sebagai landasan filosofi dalam mengembangkan langkah-langkah dan aspek-spek kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman Assegaf. (2005). *Politik Pendidikan Nasional (Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi)*. Yogyakarta: Penerbit Kurnia Kalam.
- Ali Mahmudi Amnur. (2007). *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Arif Rohman. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Azyumardi Azra. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Benny Susetyo. (2005). *Politik Pendidikan penguasa*. Yogyakarta: LKiS.
- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan Yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Darmaningtyas. (1999). *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis : Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diana Nominida Musnir. (2007). *Visi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Sejarah Nasional*. Makalah diajikan dalam Seminar Nasional tentang Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Drijarkara. (1980). *Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Farida Hanum. (2004). *Hegemoni Pendidikan*. Jurnal Fondasia. Fakultas Ilmu Pendidikan. UNY. Yogyakarta.
- Gramsci, A. (1971). *Selection From the Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishort.
- Kartini Kartono. (1977). *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Moh Yamin. (2009). *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media.
- M. Sirozi. (2005). *Politik Pendidikan (Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan pendidikan)*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.

- Mulyana, Rochmat. (2007). *Bebaskan Kaum Marjinal dari Ketertindasan Pendidikan*.
- Nezar, Patria dan Andi Arief. (1999). *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemon..*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O'Neil, William F. (2001). *Ideologi-ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zamroni. (2001). *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Jakarta: Bigraf Publishing.